

BULETIN APBN

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Edisi 3, Vol. I. Februari 2016

**Kompleksnya
Isu Pangan
Indonesia**

p. 02

**Kemerosotan
Harga Minyak
Dunia dan
Pengaruhnya
bagi
Perekonomian
Indonesia**

p. 06

DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Slamet Widodo, S.E., M.E.

Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Hafidz Huzaifah, S.Pi., M.Ec.Dev.

Dahiri, S.Si., M.Sc

Adhi Prasetyo S. W., S.M.

Editor

Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Ade Nurul Aida, S.E.

DAFTAR ISI

Update APBN.....	p.01
Kompleksnya Isu Pangan Indonesia	p.02
Kemerosotan Harga Minyak Dunia dan Pengaruhnya bagi Perekonomian Indonesia.....	p.06

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

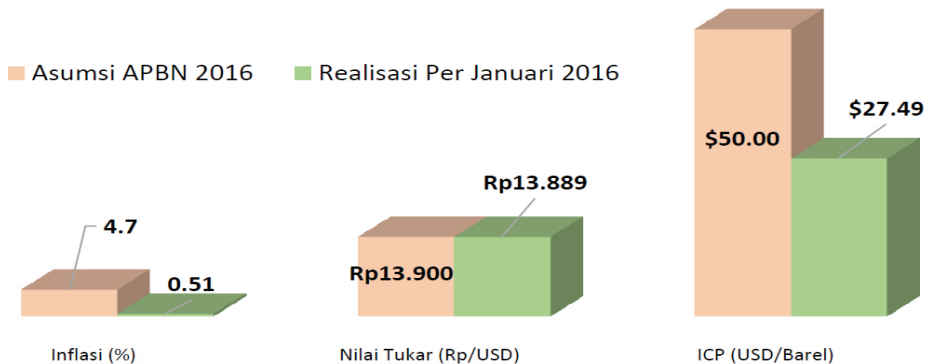
UPDATE APBN

Menurut rilis Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi tahun kalender per 31 Januari sebesar 0,51 persen. Dalam APBN 2016, tingkat inflasi ditargetkan sebesar 4,7 persen.

Untuk nilai tukar rupiah, nilai rata-rata kurs tengah hingga akhir bulan Januari sebesar Rp13.889/USD. Dalam APBN 2016, nilai tukar ditargetkan sebesar Rp13.900/USD.

Sedangkan untuk harga minyak mentah Indonesia (ICP), rata-rata nilai ICP sebesar 27,49 USD/barel. Dalam APBN 2016, nilai ICP ditargetkan sebesar 50 USD/barel.

Update Beberapa Asumsi Makro Per 31 Januari 2016 (Sumber : BPS, BI & KemESDM)



Kompleksnya Isu Pangan Indonesia

oleh

Marihot Nasution*)

Masalah Mendasar Pangan Indonesia

Indonesia menghadapi tiga isu pangan yang kompleks. Isu pangan ini terjadi akibat adanya tumpang tindih dengan persoalan lain. Adapun persoalan yang dimaksudkan, yaitu pertama, *supply* yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kurangnya *supply* pangan terjadi karena sarana prasarana pendukung pertanian di Indonesia belum mencukupi. Di sisi lain, adanya kenaikan permintaan komoditas pertanian seiring bertambahnya jumlah penduduk. Tidak sesuainya sisi *supply* dan *demand* tersebut berdampak pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang selalu bergantung pada impor yang harganya fluktuatif di pasaran internasional. Kedua, panjangnya rantai distribusi komoditas pangan yang diperparah dengan infrastruktur yang tidak mencukupi untuk mendukung lancarnya distribusi pangan. Ketiga, Indonesia telah menyatakan komitmennya terhadap program ekonomi hijau dan pembangunan pedesaan rendah emisi yang merupakan salah satu visi kedaulatan pangan.

Kebijakan swasembada pangan yang dijalankan Indonesia terbukti belum efektif menyelesaikan masalah *supply* pangan yang dihadapi. Impor masih menjadi tumpuan dalam memenuhi pasokan pangan negara. Sementara itu, kebijakan pendukung swasembada pangan yang membantu menyediakan sarana dan prasarana pertanian belum optimal dijalankan karena menemui banyak kendala di lapangan. Pembukaan lahan baru melalui pertanian berskala besar dianggap bisa mencapai tujuan swasembada. Namun, program tersebut mengalami kesulitan karena

terkendala dalam pembebasan lahan. Kebijakan pangan Indonesia sebenarnya telah memiliki tujuan baik. Namun, perhatian pada persoalan akses petani yang rentan terhadap rawan pangan dan hak pangan belum dioptimalkan. Masih terdapat *gap* antara target yang didukung kebijakan pemerintah dengan apa yang dibutuhkan masyarakat petani. Kondisi tersebut menyebabkan kebijakan yang dijalankan pemerintah sepertinya kurang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada.

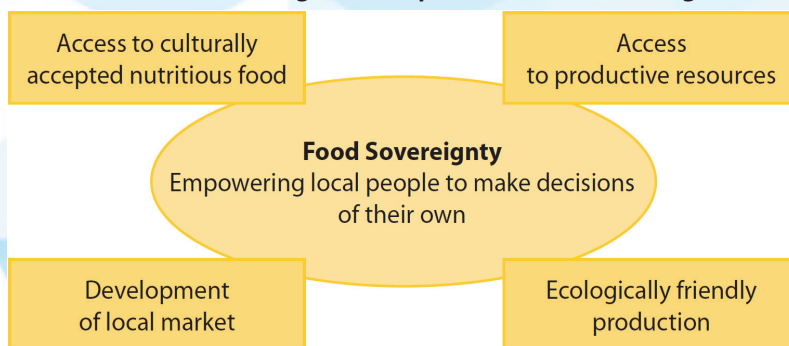
Evaluasi Performa Kementerian Pertanian

Setiap negara bebas untuk memilih kebijakannya terkait masalah pangan. Menurut John F. McCarthy, Peneliti Kebijakan Pangan menyatakan dalam artikel "Tiga Isu Pangan yang Kompleks di Indonesia", setidaknya ada lima paradigma dalam kebijakan pangan. Adapun lima paradigma tersebut antara lain:

1. swasembada pangan (*food self-sufficiency*) merupakan kebijakan pangan sebagai upaya mencapai angka produksi global;
2. ketahanan pangan (*food security*) yaitu kebijakan pangan yang menurut FAO bisa dicapai dengan memperkuat kapasitas penduduk untuk mengakses pangan terutama saat menghadapi rawan pangan dan masa paceklik;
3. kedaulatan pangan (*food sovereignty*), yakni kebijakan pangan yang membantu petani maupun kelompok tani untuk memiliki akses dan kontrol yang lebih baik atas sumber-sumber pertanian;
4. kebijakan pangan mengarah pada pencapaian hak atas ketersediaan

*) Redaktur Buletin APBN

Gambar 1. Kerangka Konseptual Kedaulatan Pangan



Sumber: *African Journal of Agricultural Research* Vol.4 (4), April, 2009 dalam Christine Maritzová, 2011. *Food Sovereignty as A Way to Achieve Food Security*. Prague Global Policy Institute – Glropolis Policy Brief.

pangan yang memadai sesuai dengan amanat dalam perjanjian internasional, dan;

5. kebijakan pangan yang memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan.

Di Indonesia kebijakan pangan ini didasarkan pada UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Undang-undang tersebut cenderung untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan. Namun, banyak aspek yang belum terpenuhi sehingga kedaulatan pangan di Indonesia masih jauh dari harapan. Jika berkaca dari definisi kedaulatan pangan sendiri, Indonesia akan sangat sulit untuk mencapainya. Pasalnya, dalam kedaulatan pangan mengharuskan petani untuk memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya pertanian produktif dan mendorong agar petani menentukan sendiri bagaimana mengelola

sumber daya tersebut. Menurut Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, hal tersebut saat ini menjadi masalah di Indonesia karena 49,5% petani Jawa dan 18,7% petani Luar Jawa tidak memiliki tanah. Dari 28,55 juta penduduk miskin 62,8% adalah petani. Rata-rata 500.000 keluarga tani/tahun tercerabut dari lahannya. Lahan pertanian pangan yang menghidupi 91,91 juta jiwa hanya bertambah dari 7,77 juta ha (1986) menjadi 8,00 juta ha (2012) 2,96%. Lahan perkebunan yang dimiliki sedikit orang meningkat dari 8,77 juta ha menjadi 21,41 juta ha (144%). Selain itu, petani belum memiliki kebebasan untuk memilih sarana produksi serta komoditas pangan mana yang akan diproduksi. Selama ini, dalam memilih sarana produksi petani di Indonesia masih sangat ditentukan komoditas pangan mana yang disubsidi

Tabel 1. Kinerja Kementerian Pertanian 2015

Indikator Kinerja	Baseline 2014	Target 2015	Realisasi 2015
PDB Pertanian (di luar Perikanan dan Kehutanan)	3,71%	3,80%	3,31%
Tanaman Pangan	0,24%	4,79%	3,48%
Tanaman Holtikultura	4,19%	2,63%	2,49%
Tanaman Perkebunan	5,83%	5,43%	3,54%
Peternakan	5,44%	3,62%	3,09%
Jasa Pertanian dan Perburuan	2,58%	2,68%	3,87%
Nilai Tukar Petani	101,21	102,00	102,83

Sumber: *Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 dan Data BPS, 2016, diolah*

pemerintah.

Kementerian Pertanian selaku penanggung jawab utama terkait masalah pangan di Indonesia belum sepenuhnya menjalankan strategi/kebijakannya secara optimal. Dengan menjunjung visi yang harus diacu oleh Kementerian/Lembaga, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, Kementerian Pertanian sendiri mengangkat visi “Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”. Dari visi tersebut diturunkan misi, tujuan, dan sasaran, serta target kinerja. Target dari strategi yang diangkat dalam Renstra tersebut belum sepenuhnya tercapai di tahun 2015 (Tabel 1).

Tahun 2015 merupakan tahun dimana Kementerian Pertanian memperoleh alokasi besar dalam APBNP 2015 (termasuk dalam 10 kementerian/lembaga dengan alokasi APBNP terbesar 2015). Namun, di semester 1 2015 penyerapan anggaran kementerian ini hanya mencapai 24,6% dari alokasi APBNP 2015. Hal ini menunjukkan kurang optimalnya pelaksanaan strategi dari Kementerian Pertanian dibanding tahun sebelumnya. Realisasi anggaran belanja Kementerian Pertanian dalam semester 1 tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp5.474,4 miliar, atau menyerap 40,2% dari pagunya yang ditetapkan dalam APBNP tahun 2014 sebesar Rp13.613,0 miliar. Penyerapan anggaran belanja tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyerapannya dalam periode yang sama tahun 2013 sebesar 36,4%. Jika penyerapan anggaran dibebankan di semester akhir tiap tahun anggaran, maka dikhawatirkan kegiatan yang dilakukan hanya sebatas formalitas belaka tanpa memikirkan dampak yang akan dihadapi di kemudian hari.

Akibat dari kondisi ini banyak target kebijakan yang tidak tercapai dan program pembangunan tidak berjalan optimal. Penyerapan anggaran K/L yang rendah akan mengakibatkan hilangnya manfaat belanja sebagai pendorong pertumbuhan, karena apabila dana yang telah dialokasikan tidak semuanya dapat dimanfaatkan, maka *multiplier effect* tidak akan maksimal atau bahkan menjadi kontradiktif. Apabila pengalokasian dan pelaksanaan anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis.

Memang jika dilihat program yang berkaitan dengan pangan ini seharusnya tidak hanya menjadi beban Kementerian Pertanian saja, melainkan diperlukan keterlibatan dari kementerian lain. Bertambahnya pasokan tanaman pangan akan tercapai jika didukung kebijakan yang memihak petani dalam segala aspek pendukung pertanian, seperti benih, pupuk, dan lahan. Distribusi pasokan pangan akan lebih lancar jika didukung oleh infrastruktur yang baik. Stabil dan meratanya pasokan pangan akan berdampak pada stabilnya harga pangan sehingga ketahanan pangan, bahkan kedaulatan pangan, dapat terwujud. Tugas berat ini layak dilakukan oleh pemerintah dengan mengedepankan koordinasi yang kuat di seluruh jajaran kabinetnya.

Catatan Redaksi

Dengan berbagai masalah yang dihadapi di bidang pertanian dan pangan ini maka ada baiknya jika pemerintah mulai **menghadirkan beberapa kebijakan yang memihak pada petani**. Kebijakan tersebut menjamin kesejahteraan petani sehingga mampu mempertahankan jumlah petani yang ada ataupun mampu menambah penyerapan tenaga kerja di bidang pertanian.

Dengan makin bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan pangan semakin bertambah pula. Dikarenakan pangan adalah masalah yang fundamental bagi seluruh

rakyat maka **diperlukan tindakan cepat dalam segala strategi pangan pemerintah, baik itu dalam penyusunan regulasi pangan, pembangunan infrastruktur, maupun pembebasan lahan.** Penyelesaian masalah yang tidak tuntas akan berakibat pada menumpuknya masalah dan makin sulit penyelesaiannya.

Stabilisasi pasokan pangan juga bisa dilakukan dengan **mengembangkan lumbung desa sebagai alat stabilisasi pasokan pangan di tiap desa.** Proses pengembangan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan dana transfer ke daerah seperti dana desa agar lebih mudah dikelola pemerintah desa bersangkutan. Lumbung desa ini dapat berfungsi sebagai cadangan beras. Dengan demikian, program lumbung desa bisa turut berperan membantu pemerintah mengatasi masalah kekurangan pasokan pangan, khususnya beras. Masalah rantai distribusi ini kerap menyebabkan harga beras melambung di pasar.

Untuk memperlancar distribusi pasokan pangan, ada baiknya **Kementerian Pertanian memperkuat koordinasi dengan kementerian lain untuk memperpendek rantai komoditas pangan.** Berbagai masalah kurangnya pasokan kadang terjadi karena hasil komoditas tidak merata. Kondisi ini memicu bertambahnya rantai komoditas pangan yang berakibat pada tingginya harga komoditas pangan. Dengan sumber daya yang dimiliki kementerian lain, komoditas pangan akan lebih mudah tersalurkan ke wilayah yang lebih membutuhkan sehingga dapat menjaga stabilitas harga.

Pemerintah telah memberi tugas khusus bagi Perum Bulog untuk menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan, namun peran ini perlu dioptimalkan. **Optimalisasi peran Perum Bulog** ini sebaiknya dilakukan

ketika terdapat komoditas yang mengalami kekurangan/kelebihan pasokan. Perum Bulog dapat melakukan intervensi pasar dengan menyerap hasil petani di saat kondisi pangan berlimpah dan menyalurkan pasokannya ketika kondisi pasokan menurun dan harga komoditas tinggi.

Daftar Pustaka

Adam, Mohammad. (2016). *Antisipasi Rawan Pangan, Menteri Desa Bangun Lumbung Desa*, diambil kembali dari <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2016/02/05/480062/antisipasi-rawan-pangan-menteri-desa-bangun-lumbung-des>

Kementerian Pertanian. (2015). *Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019*. Indonesia

Kementerian Keuangan. (2015). *Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun Anggaran 2015 Republik Indonesia*. Indonesia

Kementerian Keuangan. (2014). *Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun Anggaran 2014 Republik Indonesia*. Indonesia

Maritzová, Christine. (2011). *Food Sovereignty as A Way to Achieve Food Security*. Prague Global Policy Institute – Glopolis Policy Brief.

Purba, Gervin Nathaniel. (2015). *Tiga Isu Pangan yang Kompleks di Indonesia*, diambil kembali dari <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/06/11/135447/tiga-isu-pangan-yang-kompleks-di-indonesia>

Santosa, Dwi Andreas. (2015). *Kebijakan Sektor Pertanian Menuju Kedaulatan Pangan Indonesia*. Disampaikan dalam Workshop “Kebijakan Ekonomi dan Sektor Strategis Nasional”, DPR RI, 8 April 2015

Utami, Suci Sedy. (2016). *Kumpulan Menteri, Darmin Tugaskan BUMN Tekan Distribusi Pangan*, diambil kembali dari <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2016/02/09/481685/kumpulan-menteri-darmin-tugaskan-bumn-tekan-distribusi-pangan>

Kemerosotan Harga Minyak Dunia dan Pengaruhnya bagi Perekonomian Indonesia

Slamet Widodo, SE, ME¹⁾

Abstrak

Menurunnya harga minyak mentah dunia berdampak pada perekonomian Indonesia baik dari sisi APBN berupa penurunan penerimaan pajak dan PNBPN migas, maupun dana bagi hasil migas ke daerah. Selain itu juga berdampak pada turunnya ekspor non migas yang disebabkan merosotnya harga komoditas dunia dan perlambatan permintaan global, serta dari sisi efisiensi industri migas/Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang berencana melakukan efisiensi tenaga kerja. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah dalam menyikapi rendahnya harga minyak dunia di masa mendatang melalui upaya pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil (minyak bumi), maupun sumber alternatif lain guna menutupi kekurangan penerimaan dari sektor migas. Lebih lanjut pemerintah juga perlu mengambil kebijakan untuk mencegah adanya gelombang PHK di industri migas, sekaligus mengamankan target lifting minyak bumi di tahun ini.

Asumsi dasar ekonomi makro merupakan basis/indikator utama yang menjadi dasar dalam penyusunan APBN setiap tahunnya. Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan 7 (tujuh) asumsi dasar yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga SPN 3 bulan, rata-rata nilai tukar rupiah per 1 US\$, harga minyak mentah Indonesia (ICP), produksi/lifting minyak dan gas bumi. Setiap pergerakan/volatilitas atas asumsi dasar tersebut dapat memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap penerimaan, belanja, defisit dan pembiayaan APBN.

Dalam menentukan harga ICP, pemerintah menggunakan data/informasi harga minyak di pasaran internasional. Beberapa referensi yang digunakan pemerintah antara lain di West Texas Intermediate (WTI), New York Merchantile Exchange (NYMEX), dan Brent North Sea.

Harga minyak mentah dunia, yang menjadi salah satu variable penentu ICP, terus mengalami penurunan

dalam beberapa bulan terakhir. Harga minyak mentah yang diperdagangkan di WTI pada 21 Januari lalu bahkan telah mencapai US\$26,55 per barel untuk pengiriman bulan Februari. Harga minyak mentah Brent North Sea ditutup pada harga US\$27,88 per barel untuk pengiriman bulan Maret²⁾. Kondisi ini jauh dari patokan ICP dalam APBN 2016 sebesar US\$50 per barel. Sejumlah lembaga keuangan internasional bahkan memprediksi harga minyak bumi bisa saja turun di bawah US\$30 per barel. Morgan Stanley misalnya, mempublikasikan laporan yang menyebutkan kemungkinan minyak mencapai harga US\$20 per barel. Senada dengan itu, Goldman Sach, Citigroup juga memprediksi hal serupa³⁾.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab merosotnya harga minyak mentah dunia dapat dibagi dalam faktor non ekonomi dan faktor ekonomi. Ketegangan politik dan keamanan di Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga minyak dunia. Sementara faktor

1) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: eswidado263@gmail.com

2) <http://www.merdeka.com/uang/harga-minyak-merosot-sentuh-titik-terendah-sejak-mei-2003.html>

3) <http://karan.bisnis.com/read/20160114/245/509540/tajuk-bisnis-percepat-revisi-apbn>

yang terkait dengan sisi permintaan dan penawaran antara lain, melimpahnya *supply* minyak mentah, meningkatnya cadangan minyak AS sebagai konsumen terbesar minyak dunia, melemahnya perekonomian China, dan dicabutnya sanksi embargo ekonomi Iran.

Menghadapi kecenderungan semakin turunnya harga minyak mentah dunia, Indonesia harus memiliki *escape plan* untuk terus mengurangi dampak volatilitas harga minyak dunia bagi pembangunan ekonomi.

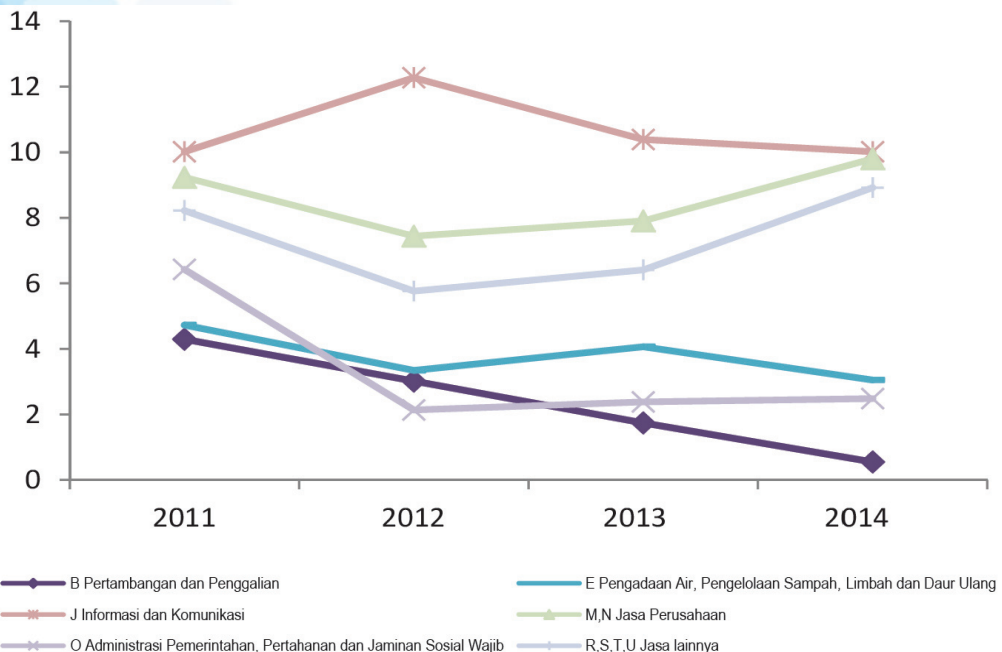
Dampak penurunan harga minyak dunia

Kemerosotan harga minyak mentah dunia memiliki dampak positif dan negatif bagi perekonomian Indonesia. Dampak positif berupa kurangnya beban fiskal untuk membiayai subsidi energi. Pengurangan subsidi energi berdampak signifikan terhadap ICP, karena berdasarkan nota keuangan APBN 2016, setiap kenaikan ICP

US\$1 per barel akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara sebesar Rp3,4 – 3,9 triliun, menambah belanja negara sebesar Rp2,6 – 3,8 triliun, dan mengakibatkan adanya kelebihan pembiayaan sebesar Rp0,1 – 0,9 triliun. Dampak negatif adalah berkurangnya penerimaan negara dari sektor migas.

Meskipun harga minyak telah meleset dari asumsi yang ditetapkan dan pemerintah masih mampu mengelola APBN 2016 yang baru berjalan selama 1,5 bulan ini, namun pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi kecenderungan penurunan harga minyak selama tahun 2016 ini dan bahkan beberapa tahun ke depan. Penurunan ini diprediksi dapat mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia, APBN dan masalah tenaga kerja di sektor pertambangan. Beberapa hal yang terkena dampak merosotnya harga minyak dunia antara lain:

Gambar 1. Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2011–2014



Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2015, BPS

1. Dampaknya bagi perekonomian

Sektor pertambangan dan penggalian merupakan salah satu sektor yang mencerminkan indikator kinerja suatu perekonomian yang memiliki korelasi langsung terhadap serapan tenaga kerja dan produktivitas perekonomian suatu negara. Sektor ini juga berkontribusi langsung tidak hanya pada kuantitas output perekonomian, tetapi juga kualitas pertumbuhan perekonomian. Dengan kata lain sektor pertambangan dan penggalian merupakan salah satu sektor *tradable* yang membentuk besaran pertumbuhan ekonomi melalui produk domestik bruto.

Berbeda dengan kontribusi sektor lain yang memiliki kecenderungan meningkat, sektor pertambangan dan penggalian selama empat tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan, dimana laju pertumbuhan tahun 2011 sebesar 4,25% dan tahun 2014 hanya sebesar 0,55%. Pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang paling terkena imbas kebijakan pemerintah baru mengenai larangan ekspor bahan mineral mentah. Di samping itu, penurunan permintaan global dan harga komoditas di pasar internasional juga menyebabkan pertumbuhan lapangan usaha ini merosot tajam.

2. Dampaknya bagi harga komoditas

Harga komoditas utama internasional menunjukkan tren pelemahan sejak tahun 2012 hingga 2014. Selain karena penguatan permintaan yang belum signifikan, meningkatnya pasokan komoditas dunia telah menyebabkan berlanjutnya tren penurunan harga komoditas global. Kinerja pertumbuhan ekonomi negara-negara maju tidak seperti yang diharapkan serta tingginya volatilitas di pasar

keuangan global merupakan beberapa faktor yang menekan harga komoditas global. Sebagian besar harga komoditas internasional sepanjang tahun 2012-2014 menunjukkan tren menurun, yang disebabkan karena rendahnya permintaan dari negara-negara maju dan negara *emerging market*.

Harga komoditas pertanian diproyeksikan menurun 1,4%, dengan penurunan di hampir semua kelompok komoditas utama, mencerminkan prospek produksi yang memadai meski ada kekhawatiran gangguan dari El Nino, tingkat stok mencukupi, biaya energi yang lebih rendah dan permintaan datar untuk biofuel⁴. Rendahnya harga minyak dunia, dan perlambatan perekonomian global masih memberi tekanan bagi harga komoditas dunia.

3. Dampaknya bagi APBN

Dalam APBN tahun 2016, dengan asumsi harga minyak US\$50 per barel, total penerimaan dari minyak dan gas bumi ditargetkan mencapai Rp120,06 triliun, yang terdiri dari penerimaan bukan pajak (PNBP) sebesar Rp78,6 triliun dan pajak penghasilan (PPH) Migas sebesar Rp41,4 triliun. Pemerintah memprediksi bahwa penurunan harga minyak akan mengurangi penerimaan migas sebesar Rp30 triliun atau menjadi sebesar Rp90 triliun⁵. Penurunan ini dengan memprediksikan harga minyak dunia sebesar US\$30 per barel.

Namun demikian, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, harga minyak dunia bukanlah isu utama dalam perubahan APBN. Meskipun akibat pergerakan tersebut memberikan pengaruh terhadap penerimaan negara, khususnya PPH Migas dan PNBP. Ada tiga hal utama yang menjadi pertimbangan dalam mengubah

4) <http://www.suarakarya.id/2016/01/28/2016-harga-komoditas-dunia-kian-merosot.html>

5) <http://finance.detik.com/read/2016/02/17/151057/3144396/1034/harga-minyak-us-30-barel-penerimaan-negara-anjlok-rp-90-t>

APBN. Pertama adalah sisi perubahan asumsi makro yang signifikan, seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan inflasi. Kedua yaitu penerimaan negara yang anjlok dan ketiga adalah belanja yang melonjak⁶.

Penerimaan PPh migas dan PNBP migas sepanjang tahun 2010-2015 menunjukkan fluktuasi dan memiliki kecenderungan menurun. Sepanjang tahun 2010-2014, penerimaan PPh migas meningkat dari Rp58,8 triliun menjadi Rp87,4 triliun atau meningkat rata-rata sebesar 11% per tahun, demikian halnya dengan PNBP Migas yang meningkat dari Rp152,7 triliun menjadi 216,8 triliun atau mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 10%. Namun sering dengan menurunnya harga minyak mentah dunia dan lifting minyak bumi, penerimaan PPh migas dan PNBP migas di tahun 2015 mengalami penurunan signifikan sebesar masing-masing 43% dan 62%. Menghadapi kecenderungan rendahnya harga minyak dunia di tahun ini, tentunya akan semakin mengurangi kemampuan penerimaan negara di sektor ini. Dampaknya juga akan dirasakan oleh daerah dalam bentuk berkurangnya dana bagi hasil migas, yang telah menurun sebesar 30% pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2010.

4. Dampaknya bagi tenaga kerja, khususnya di sektor industri migas

Sektor pertambangan sekarang ini tetap menjadi salah satu sektor utama yang menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Indikasi ini terlihat dari kontribusi penerimaan negara yang setiap tahunnya meningkat. Selain itu, sektor pertambangan juga memberikan efek pengganda 1,6 – 1,9 atau menjadi pemicu pertumbuhan sektor lainnya serta menyediakan kesempatan kerja bagi sekitar 34 ribu

tenaga kerja langsung⁷.

Menghadapi rendahnya harga minyak dunia, yang berdampak pada turunnya pendapatan perusahaan migas, sektor ini pun menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Sejumlah KKKS asing sudah mengajukan usulan kepada SKK migas untuk melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja. Salah satu yang mengajukan adalah raksasa migas AS yaitu Cevron Indonesia, yang berencana melakukan pengurangan pekerja hingga 25%. Apabila pemerintah tidak segera mengambil kebijakan, tentunya akan berdampak bagi pencapaian target produksi minyak bumi yang telah ditetapkan sebesar 830 ribu barel per hari dalam tahun 2016.

Rekomendasi

Dalam menanggapi kemerosotan harga minyak dunia, Indonesia perlu menerapkan beberapa langkah berikut, diantaranya: **pertama, perlu adanya upaya mengimplementasikan kebijakan energi nasional, untuk menghindari ketergantungan yang kuat pada energy fosil (migas).** Pemerintah perlu mewujudkan cadangan energi baru terbarukan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menyatakan bahwa pemenuhan energi baru dan terbarukan paling kurang sudah memenuhi 23% dari bauran energi di tahun 2025. Sebanyak 17 negara yang menghadiri Bali Clean Energy Forum (BCEF) di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali pada 11-12 Februari 2016, telah menanda tangani kesepakatan untuk memperkuat pembangunan energi baru dan terbarukan. Indonesia diharapkan menjadi pelopor dan pendorong bagi terwujudnya

6) <http://finance.detik.com/read/2016/02/16/185800/3143684/1034/kemenkeu-harga-minyak-bukan-isu-utama-di-apbn>

7) <http://www.esdm.go.id/berita/37-umum/601-peranan-sektor-pertambangan-dalam-mendorong-perekonomian-nasional.html>

komitmen internasional ini.

Kedua, pemerintah harus mengantisipasi ancaman PHK di sektor industri migas akibat semakin tidak ekonomisnya sektor migas ini.

Beberapa KKKS berharap pemerintah dapat memberikan insentif antara lain berupa moratorium eksplorasi, fleksibilitas mengubah kegiatan eksplorasi ke blok lain, hingga adanya penghilangan pajak sementara (*tax holiday*). Pemberian insentif bagi perusahaan migas tentunya harus dipertimbangkan secara mendalam karena dampaknya akan mengurangi penerimaan negara di tengah komitmen pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur dan memperkecil kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Ketiga, pemerintah perlu menggali sumber alternatif penerimaan pajak untuk menutupi kekurangan penerimaan negara akibat merosotnya harga minyak dunia maupun perlambatan ekonomi global. RUU Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang telah masuk ke dalam Prolegnas tahun 2015, diharapkan dapat menutupi sebagian shortfall penerimaan negara, melalui pengenaan tarif tertentu yang akan dibebankan kepada wajib pajak yang mengajukan pengampunan pajak.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik, (2015). *Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2015*. Indonesia

Kementerian Keuangan, (2016). *Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2016*. Indonesia

Koran Merdeka, 21 Januari 2016. *Harga minyak merosot, sentuh titik terendah sejak Mei 2003*. Diakses dari <http://www.merdeka.com/uang/harga-minyak-merosot-sentuh-titik-terendah-sejak-mei-2003.html>. Diakses tanggal 15 Februari 2016.

Koran Bisnis, 14 Januari 2016. *Tajuk Bisnis: Percepat Revisi APBN*. Diakses dari <http://koran.bisnis.com/read/20160114/245/509540/tajuk-bisnis-percepat-revisi-apbn>. Diakses tanggal 15 Februari 2016.

Koran Suara Karya, 28 Januari 2016. *2016: Harga Komoditas Dunia Kian Merosot*. Diakses dari <http://www.suarakarya.id/2016/01/28/2016-harga-komoditas-dunia-kian-merosot.html>. Diakses tanggal 12 Februari 2016.

Koran Detik, 17 Februari 2016. *Harga Minyak US\$ 30/barel, Penerimaan Negara Anjlok Rp 90 T*. Diakses dari <http://finance.detik.com/read/2016/02/17/151057/3144396/1034/harga-minyak-us--30-barel-penerimaan-negara-anjlok-rp-90-t>. Diakses tanggal 11 Februari 2016.

Koran Detik, 16 Februari 2016. *Kemenkeu: Harga Minyak Bukan Isu Utama di APBN*. Diakses dari <http://finance.detik.com/read/2016/02/16/185800/3143684/1034/kemenkeu-harga-minyak-bukan-isu-utama-di-apbn>. Diakses tanggal 15 Februari 2016.

Kementerian ESDM, 22 Februari 2016. *Peranan Sektor Pertambangan Dalam Mendorong Perekonomian Nasional*. Diakses dari <http://www.esdm.go.id/berita/37-umum/601-peranan-sektor-pertambangan-dalam-mendorong-perekonomian-nasional.html>. Diakses tanggal 12 Februari 2016.



Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635/5715528, Fax. 021-5715528
e-mail puskaji.anggaran@dpr.go.id